



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN MANAJEMEN DAN ADVISORY PENGADAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARUM SETIAWATI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 271733

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.440.000.000

1. LAINNYA, MERCEDES BENZ C 250 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS TH 2022 YARIS GR 2022 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARIER 2008 2400 CC ABU MUDA METALIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
5. MOBIL, HONDA ACCORD HONDA ACCORD VTIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
6. MOBIL, MERCI C200 AT C200 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 851.340.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.588.925.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.728.366.118
F. HARTA LAINNYA	Rp.	515.066.859
Sub Total	Rp.	13.323.697.977
III. HUTANG	Rp.	866.102.016
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.457.595.961

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.